

ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF KOMODITAS KOPI

Oleh

Rachmat Hendayana, Budiman Hutabarat,
dan Budi Santoso¹⁾

Abstract

The share of Indonesian export in world coffee trade in the last five year (1986 to 1990) has grown at slow rate of 1.2 percent per annum. Ever since coffee export quota was frozen in 1989, Indonesian revenue from coffee trade has tended to decline as competition from other countries evolves. The paper investigates the competitive strength of Indonesian coffee produced by state-owned plantation (BUMN), private-owned plantation (PBS), and small-scale farmers (SSF).

By applying Domestic Resources Cost Ratio (DRCR) it was concluded that: **First**, up until production stage, coffee farming by BUMN and PBS result in economic profits which are less than financial profits, while SSF incurs losses. **Second**, the first two types are relatively efficient in utilizing domestic resources with the values of DRCR at 0.68 and 0.75 respectively; meaning that the systems have comparative advantage in producing coffee bean, while SSF is not efficient with DRCR at 1.07. However, if investigation is done through processing stage, the analysis shows that both types are not efficient and, therefore, not competitive. DRCRs for both are 1.24 and 1.56, respectively. **Third**, it appears that price is the most important factor in determining the feasibility of coffee farming relatif to the price of production inputs such as fertilizer and labour wage. **Fourth**, in order to improve coffee processing in BUMN and PBS, some effort to deregulate industrial sector that produces machines, and other equipments that are needed in coffee processing activities, and in order to improve small-scale farms performance, extention effort to enhance agronomical and technological skill of farmers needs to be continued.

PENDAHULUAN

Kopi adalah salah satu komoditas perkebunan yang diandalkan untuk mendatangkan devisa sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Di pasar dunia, sejak tahun 1984 volume ekspor kopi Indonesia menempati peringkat ketiga setelah Brazil dan Columbia. Sebagai gambaran, pada tahun 1986 volume ekspor kopi Brazil, Columbia dan Indonesia masing-masing sebesar 771 ribu ton, 690 ribu ton dan 284 ribu ton. Khusus untuk kopi jenis Robusta, ekspor Indonesia menempati peringkat pertama di pasar dunia. Kopi Robusta Indonesia dipakai oleh kebanyakan negara konsumen terutama sebagai bahan baku "instant coffee" dan sebagai bahan campuran kopi bubuk (roasted ground coffee) (Baharsjah *et al.*, 1978).

¹⁾Masing-masing Staf Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

Perkembangan ekspor kopi Indonesia selama periode tahun 1986-1990 cenderung semakin meningkat. Pada tahun 1986 volume ekspor kopi Indonesia baru mencapai 298,5 ribu ton, namun pada tahun 1990 telah mencapai 465,1 ribu ton, atau mengalami peningkatan sebesar 13,6%/tahun.

Yang menarik dikemukakan menyangkut ekspor kopi Indonesia adalah terjadinya pergeseran pangsa menurut negara tujuan. Pangsa terbesar volume ekspor kopi Indonesia pada tahun 1986 adalah ke Amerika Serikat yang mencapai 22,6%, sedang pada tahun 1990 bergeser ke Jerman Barat yang mencapai 28,8%. Terjadinya pergeseran pangsa volume ekspor kopi Indonesia menurut negara tujuan ini berkaitan erat dengan ketatnya persaingan di pasar kopi internasional.

Makalah bertujuan untuk: (1) memperkirakan kelayakan, pengusahaan kopi di tingkat perkebunan milik Badan Usaha Milik Negara perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan rakyat serta daya saing mereka dalam mengekspor kopi; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan pengusahaan dan ekspor kopi; (3) memberikan saran kebijakan untuk memperbaiki daya saing kopi Indonesia di pasar dunia.

METODA PENELITIAN

Cakupan dan Lokasi

Tanaman kopi yang diamati adalah milik perkebunan rakyat, BUMN dan PBS, dengan umur tanaman bervariasi mulai dari umur 5 tahun hingga umur lebih dari 40 tahun. Periode pertanaman yang diamati adalah satu tahun terakhir, saat dilangsungkannya penelitian pada tahun 1992.

Penelitian dilakukan di Propinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu propinsi produsen utama kopi di Indonesia. Di propinsi bersangkutan dipilih kabupaten Jember dan Banyuwangi sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan merupakan dua kabupaten produsen utama kopi.

Sumber Data

Data primer diperoleh lewat survai terhadap responden yang terdiri dari petani kopi perkebunan rakyat, PBS dan perkebunan milik BUMN. Responden petani kopi berasal dari 4 kecamatan meliputi 8 desa di Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Sementara itu, responden Perkebunan milik BUMN berjumlah lima buah, tiga buah di kabupaten Jember dan dua buah di kabupaten Banyuwangi.

Disamping data primer, digunakan pula data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait.

Metoda Analisis

Analisis yang digunakan dalam pembahasan adalah analisis finansial dan analisis ekonomi. Analisis finansial digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan yang diterima langsung oleh petani dari pengusaha kopi, biaya usaha dan penentuan harga kopi yang layak. Analisis ekonomi digunakan untuk menentukan tingkat penerimaan bagi masyarakat secara keseluruhan dan penentuan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dalam negeri.

Alat analisis ekonomi yang digunakan adalah Nisbah Biaya Sumberdaya Dalam Negeri (NBSDN). Alat analisis ini telah digunakan pada komoditas lain oleh beberapa peneliti antara lain Suryana (1987), Rusastra (1982, 1990), Simatupang (1990) Hutabarat *et al.*, (1990) dan Sumaryanto (1991).

Melalui alat analisis ekonomi ini akan diperoleh gambaran tentang alternatif terbaik kebijakan pengembangan produksi dan perdagangan kopi ditinjau dari segi penghematan sumberdaya dalam negeri.

Perbedaan penting antara analisis ekonomi dan analisis finansial terletak dalam hal jenis harga yang digunakan dan perlakuan terhadap pembayaran alihan (transfer). Dalam analisis finansial harga yang dipakai adalah harga riil yang berlaku di pasar, sedangkan pada analisis ekonomi harga yang dipakai adalah harga bayangan (shadow price). Yang dimaksud harga bayangan adalah tingkat harga suatu komoditas pada kondisi pasar persaingan sempurna. Semua pembayaran alihan seperti pajak dan subsidi di keluarkan dari perhitungan biaya.

Analisis NBSDN dapat mengukur efisiensi ekonomi suatu kegiatan yang menggunakan sumberdaya dalam negeri yang langka untuk memperoleh atau menghemat satu-satuan devisa, yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut (Pearson *et al.*, 1976):

$$\text{NBSDN} = \frac{\text{DC} - \text{DB}}{\text{TB} - \text{TC}}$$

dimana:

- NBSDN = Nisbah Biaya Sumberdaya Dalam Negeri
- DC = biaya dalam negeri dari proses produksi dan pemasaran
- DB = unsur dalam negeri dari penerimaan
- TB = unsur asing dari penerimaan
- TC = unsur asing dari biaya produksi dan pemasaran.

Dalam rumus di atas, komponen biaya dan penerimaan dinyatakan dalam satuan rupiah. Jika koefisien NBSDN lebih kecil dari 1 (satu), artinya bahwa suatu kegiatan ekonomi efisien dalam pemanfaatan sumberdaya domestik sehingga

pemenuhan permintaan dalam negeri lebih menguntungkan dilakukan dengan peningkatan produksi dalam negeri. Jika koefisien NBSDN lebih besar dari 1 (satu), artinya pemenuhan permintaan dalam negeri lebih menguntungkan dilakukan lewat impor. Semakin kecil koefisien NBSDN, semakin efisienlah kegiatan ekonomi yang dianalisis atau semakin layak penerapan suatu paket teknologi ditinjau dari efisiensi pemanfaatan sumberdaya dalam negeri.

Tahapan perhitungan NBSDN sebagai berikut: **pertama**, mengidentifikasi seluruh masukan dan keluaran dalam kegiatan yang dianalisis; **kedua**, memisahkan biaya seluruh kegiatan tersebut ke dalam komponen dalam negeri dan asing; **ketiga**, menaksir harga bayangan masukan dan keluaran pada butir pertama.

Identifikasi masukan-keluaran dilakukan terhadap semua kegiatan usahatani kopi mulai dari masa pertanaman di kebun sampai terbentuknya biji kopi sebagai produk akhir kegiatan usahatani kopi.

Pemisahan biaya ke dalam komponen dalam negeri dan komponen asing dilakukan dengan pendekatan langsung karena penelitian ini melakukan analisis komparatif. Dalam pendekatan langsung ini biaya seluruh komponen yang dapat diperdagangkan baik masukan impor maupun masukan produksi dalam negeri dinilai 100 persen sebagai komponen biaya asing. Tenaga kerja dan lahan dinilai 100 persen sebagai komponen biaya dalam negeri. Untuk peralatan, sebesar 50 persen dimasukkan sebagai komponen biaya asing, sisanya dianggap sebagai komponen dalam negeri (Suryana, 1981).

Harga bayangan masukan dan keluaran yang dapat diperdagangkan ditaksir sebesar harga CIF (Cost Insurance Freight) bila saat ini komoditas tersebut diimpor dan harga FOB (Free on Board) bila saat ini komoditas bersangkutan diekspor. Harga bayangan bibit kopi dan pupuk kandang ditaksir dari banyaknya curahan tenaga kerja yang diperlukan untuk memperoleh masukan tersebut. Harga bayangan peralatan ditaksir sebesar harga pasar. Harga bayangan tenaga kerja pada analisis dengan data sekunder ditaksir sebesar 0.7 dari upah pasar, mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh Suryana (1981) di Jawa Timur. Sementara itu, harga bayangan tenaga kerja pada analisis dengan data primer ditaksir sebesar upah pasar. Demikian juga harga bayangan lahan per tahun ditaksir sama dengan harga pasar.

PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN EKSPOR KOPI INDONESIA

Produksi kopi di Indonesia dihasilkan perkebunan rakyat, perkebunan milik BUMN dan PBS. Produksi kopi Indonesia dalam periode tahun 1980 - 1989 menunjukkan perkembangan cukup berarti. Pada tahun 1988 produksi kopi Indonesia sebesar 296,1 ribu ton, sedangkan pada tahun 1989 meningkat menjadi

439,8 ribu ton atau naik dengan laju pertumbuhan 4,5 persen per tahun. Laju pertumbuhan produksi pada PBS, perkebunan milik BUMN dan Perkebunan Rakyat masing-masing sebesar 5,3; 1,2 dan 4,7 persen per tahun (Tabel 1). Dengan demikian, laju pertumbuhan produksi pada PBS lebih cepat dibandingkan dengan yang terjadi pada perkebunan milik BUMN dan perkebunan rakyat.

Tabel 1. Perkembangan produksi kopi di Indonesia menurut status pengusahaannya 1980-1989

Tahun	Perkebunan milik BUMN	PBS	Perkebunan Rakyat	Total
(Ton)				
1980	13212 (4.5)	6466 (2.2)	276395 (93.4)	296073
1981	16189 (5.1)	8309 (2.6)	290401 (92.2)	314899
1982	13297 (4.7)	5707 (2.0)	262247 (93.2)	281251
1983	10147 (3.3)	8318 (2.7)	287183 (94.0)	305648
1984	14775 (4.7)	9423 (3.0)	291291 (92.3)	315489
1985	12635 (4.1)	10359 (3.3)	288404 (92.6)	311398
1986	17664 (5.0)	9553 (2.7)	329605 (92.4)	356822
1987	13043 (3.4)	7791 (2.0)	367835 (94.6)	388669
1988	13043 (3.3)	10584 (2.7)	374833 (94.1)	398460
1989	16547 (3.8)	10534 (2.4)	412775 (93.8)	439856
Laju Pertumbuhan (%/tahun)	1.2	5.3	4.7	4.5

Keterangan: () persentase terhadap total

Dari segi volume produksi per tahun, pangsa perkebunan rakyat adalah dominan selama periode tahun 1980-1989, yang mencapai lebih dari 90 persen total produksi kopi Indonesia. Sementara itu, yang dihasilkan perkebunan milik BUMN dan PBS masing-masing hanya berkisar 3 - 5 persen dan 2 - 3 persen.

Bagian terbesar dari produksi kopi Indonesia ditujukan untuk ekspor, baik ke negara-negara anggota ICO (berdasarkan kuota) maupun ke negara di luar anggota ICO (non kuota). Dalam periode tahun 1980-1989 ekspor kopi Indonesia mengalami peningkatan dari 238,7 ribu ton pada tahun 1980 menjadi 357,6 ribu ton pada tahun 1989 atau naik dengan laju pertumbuhan 3,6 persen/tahun. Rataan pangsa ekspor kopi tersebut sebesar 72,7 persen dari total produksi. Pangsa terendah terjadi pada tahun 1981 yang mencapai 66,8 persen dan pangsa tertinggi terjadi pada tahun 1989 yang mencapai 93,3 persen (Tabel 2).

Tingginya pangsa kopi Indonesia yang diekspor tersebut berkaitan dengan rendahnya konsumsi kopi di dalam negeri yang menurut perkiraan AEKI (1981) sebesar 0,5 kg/kapita/tahun. Konsumsi kopi di dalam negeri ini jauh lebih rendah daripada konsumsi kopi di Jepang dan Amerika.

Tabel 2. Perkembangan produksi dan ekspor kopi Indonesia, 1980-1989

Tahun	Produksi	Ekspor	(%)
	(Ton)		
1980	295973	238677	80.6
1981	314899	210595	66.9
1982	301251	226985	75.3
1983	305648	241238	78.9
1984	315489	294471	93.3
1985	311398	282671	90.8
1986	356822	298124	83.5
1987	388669	286316	73.7
1988	398460	298998	75.0
1989	439836	357600	81.3
Laju Pertumbuhan (%/tahun)	4.5	3.6	

Sumber : BPS (1990) dan Ditjen Perkebunan (1989)

Keterangan : () persentase ekspor terhadap produksi.

Sejak tahun kopi 1981/1982 sampai tahun kopi 1990/1991 ekspor Indonesia ke negara anggota ICO cenderung terus meningkat, sedangkan ke negara non kuota menurun. Pada tahun kopi 1981/1982 pangsa ekspor ke negara kuota dan non kuota masing-masing sebesar adalah 59,4 dan 40,6 persen, dan pada tahun kopi 1990/1991 masing-masing sebesar 68,5 dan 31,5 persen. Laju pertumbuhan ekspor ke negara kuota mencapai 42 persen per tahun sementara ke negara non kuota mencapai -37 persen per tahun (Tabel 3.).

Tabel 3. Pangsa volume ekspor kopi Indonesia menurut negara kuota dan bukan kuota, periode tahun kopi 1981/82 - 1990/91

Tahun kopi	Negara kuota (%)	Negara bukan kuota (%)
1981/82	59,42	40,58
1982/83	60,12	39,88
1983/84	54,77	45,23
1984/85	49,34	50,66
1985/86	75,41	24,59
1986/87	73,72	26,28
1987/88	50,03	49,97
1988/89	53,98	46,02
1989/90	81,27	18,73
1990/91	68,51	31,49
Laju pertumbuhan (%/tahun)	42	-37

Sumber: AEKI (1992)

Dewasa ini ekspor kopi Indonesia ditujukan paling sedikit ke 21 negara kuota terutama MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu dalam dekade 1980-an, dapat diperhatikan bahwa peta konsumen kopi Indonesia telah berubah secara menyolok dengan diversifikasi pasar yang lebih baik (Tabel 4).

Tabel 4. Pangsa volume ekspor kopi Indonesia ke berbagai wilayah pemasaran

Wilayah	Tahun (%)	
	1980/81	1988/89
Amerika Utara	35	10
Eropa:	24	36
Eropa Barat	20	27
Eropa Timur	4	9
Asia:	25	34
Asia Barat	0	5
Asia Timur	25	29
Afrika Utara	2	18
Lainnya	14	2
Total	100	100

Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa pada tahun 1980/81, 35 persen ekspor kopi Indonesia diserap oleh wilayah Amerika Utara, terutama Amerika Serikat, tetapi pada tahun 1988/89 pangsa ini menurun menjadi hanya 10 persen. Sementara itu pangsa ekspor ke Eropa melonjak tajam dari 24 persen menjadi 36 persen dengan peningkatan 7 persen ke Eropa Barat dan 5 persen ke Eropa Timur.

Demikian pula, ekspor kopi Indonesia ke wilayah Asia juga meningkat sebesar 10 persen, terutama ke Asia Barat. Namun, yang paling menyolok adalah peningkatan pangsa ekspor ke wilayah Afrika Utara dari 2 persen pada tahun 1980/1981 menjadi 18 persen pada tahun 1988/89. Agaknya dimasa mendatang perubahan semacam ini akan terus terjadi. Karenanya dimasa mendatang tidak mustahil bahwa Asia dan wilayah Pasifik akan menjadi penyerap terbesar ekspor kopi Indonesia, sedangkan peran Amerika Utara akan menurun.

Pada tahun 1970-an, volume ekspor kopi Indonesia tidak pernah melebihi 25 ribu ton per tahun ke negara bukan anggota ICO. Tetapi sejak tahun 1980/81, bersamaan dengan pemberian insentif oleh pemerintah kepada eksportir yang melakukan ekspor kopi ke negara-negara bukan kuota, volume ekspor kopi ke negara bukan ICO meningkat tajam yang mencapai puncaknya pada tahun 1984/85 ketika pangsa volume ekspor ke negara bukan kuota mencapai 2,7 persen lebih tinggi daripada pangsa volume ekspor ke negara kuota (Yahmadi, 1991).

DINAMIKA HARGA KOPI

Harga riil kopi di pasar dunia, selama empat dekade, sejak tahun 1950, merosot dengan laju sebesar 1,7 persen per tahun (Sudaryanto dan Hutabarat, 1992). Bank Dunia (1992) memproyeksikan harga kopi akan merosot sampai tahun 1992 dan mulai tahun 1993 akan naik lagi dengan harga AS\$ 1,32 per kg, kemudian menjadi AS\$ 1,52 per kg pada tahun 1995 dan AS\$ 1,89 per kg pada tahun 2005. Mengharapkan membaiknya harga kopi adalah beralasan karena merosotnya harga yang terjadi selama ini mengakibatkan produsen mengurangi produksinya dengan maksud agar harga kopi meningkat lagi.

Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir ini, pernah terjadi dua kali penurunan secara tajam produksi kopi dunia karena menurunnya produksi Brazil (penghasil utama kopi dunia), sebagai akibat terjadinya embun upas (frost) pada tahun 1975 dan kekeringan (drought) pada tahun 1985. Kedua kejadian ini menyebabkan peningkatan secara tajam harga kopi dunia maupun harga kopi di dalam negeri (Jakarta) pada tahun berikutnya. Harga kopi dunia pada tahun 1976 dan tahun 1986 masing-masing meningkat 118,8% dan 33,6% dibandingkan harga tahun sebelumnya. Sementara itu harga kopi di dalam negeri pada tahun 1976 melonjak tajam 231,7% dibandingkan harga tahun 1975, namun harganya pada tahun 1986 menurun 37,5% dibandingkan harga tahun 1985.

Harga kopi dipengaruhi oleh jenis dan mutu biji kopi, Jenis kopi yang umum diproduksi dan diperdagangkan dewasa ini adalah Robusta dan Arabica. Mutu biji kopi tergantung pada cara pengolahannya, yang dibedakan menjadi pengolahan kering (dry processing) dan pengolahan basah (wet processing). Kopi Robusta mempunyai harga lebih rendah daripada Arabica dan biji kopi olahan kering mempunyai harga lebih rendah dibandingkan biji kopi olahan basah karena biji kopi olahan kering mutunya lebih rendah dari pada biji kopi olahan basah.

Meningkatnya pendapatan masyarakat di negara konsumen, tampak menyebabkan permintaan konsumen beralih pada kopi yang bermutu lebih baik dan berharga mahal seperti kopi dari jenis Arabica. Gejala yang sama dapat diperhatikan juga dari meningkatnya permintaan konsumen terhadap kopi olahan basah dari jenis Robusta. Permintaan terhadap kopi dengan mutu tinggi (mutu 1 dan 2) dan mutu sedang (mutu 3 dan 4) lebih besar dibandingkan terhadap kopi dengan mutu rendah (mutu 5 dan 6). (Tabel 5).

Tabel 5. Pangsa permintaan kopi Indonesia berdasarkan mutu

M u t u	Pangsa (%)	
	1984/85	1988/89
Mutu Tinggi (Mutu 1 dan 2)	5,65	9,60
Mutu Sedang (Mutu 3 dan 4)	56,39	71,83
Mutu Rendah (Mutu 5 dan 6)	37,96	18,57
Total	100	100

Sumber: Yahmadi (1991).

Dengan diterapkannya baku mutu melalui sistem nilai cacat (defect system) di seluruh Indonesia oleh Departemen Perdagangan sejak 1 Oktober 1983, pangsa volume ekspor kopi dengan mutu tinggi dan sedang masing-masing meningkat dari 5,7 dan 56,4 persen pada tahun 1981/1985 menjadi 9,6 dan 71,8 persen pada tahun 1988/89. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama pangsa volume ekspor kopi dengan mutu rendah berkurang dari 37,96 persen menjadi 18,57 persen. Peningkatan mutu kopi yang diekspor dari Indonesia tentu saja menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah dan memperluas pasar kopi Indonesia di luar negeri.

PANGSA PASAR KOPI INDONESIA

Kelangsungan perdagangan kopi internasional tidak terlepas dari pengendalian yang dilakukan oleh organisasi kopi internasional (International Coffee Organization), yang beranggotakan negara-negara produsen dan konsumen kopi. Beberapa kebijakan antara lain yang menyangkut penetapan harga kopi dan pembagian kuota kopi bagi negara-negara produsen ditetapkan oleh organisasi tersebut melalui suatu perundingan.

Dalam tahun kopi 1988/1989 jumlah negara yang bergabung dalam ICO meliputi 74 negara dengan perincian: 50 negara merupakan produsen kopi dan 24 negara lainnya merupakan konsumen kopi (Yahmadi, 1991). Diluar negara-negara kuota ini, pasokan kopi ke pasar dunia juga terjadi terutama berasal dari negara-negara yang bukan anggota ICO dengan pangsa yang relatif kecil yaitu 10 persen dari volume konsumsi dunia. Tabel 6 berikut menampilkan pangsa kopi Indonesia di pasar kopi dunia.

Dari Tabel 6 tampak bahwa selama periode tahun 1986-1990 pangsa volume ekspor kopi Indonesia di pasar dunia mengalami peningkatan sebesar 1.2 persen, namun pangsa nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,5 persen. Dari sini diperoleh petunjuk bahwa terjadi kemerosotan harga kopi dunia yang disebabkan antara lain oleh ketatnya persaingan dalam perdagangan kopi.

Tabel 9. Pangsa volume dan nilai ekspor kopi Indonesia di pasar dunia, 1986-1990

Tahun	Dunia		Indonesia	
	Volume (ton)	Nilai (US\$ 10000)	Volume (ton)	Nilai (US\$ 10000)
1986	4086867	1526313	298174 (7.3)	81849 (5.4)
1987	4447532	1031602	286304 (6.4)	53556 (5.2)
1988	4229611	1049810	298972 (7.1)	55023 (5.2)
1989	4795494	974739	357477 (7.5)	49040 (5.0)
1990	4991237	769950	421831 (8.5)	37704 (4.9)

Sumber : FAO (1988, 1990)

Keterangan : () persentase terhadap volume dan nilai ekspor kopi dunia

Negara penyerap terbesar ekspor kopi Indonesia pada tahun 1986 adalah Amerika Serikat dengan pangsa sebesar 22,6 persen, kemudian diikuti oleh Belanda, Jepang dan Jerman Barat dengan pangsa masing-masing sebesar 15,3; 15,2 dan 12,9 persen. Pada tahun 1990 terjadi pergeseran dalam peringkat penyerapan ekspor kopi Indonesia diantara keempat negara tersebut. Negara penyerap terbesar ekspor kopi Indonesia pada tahun 1990 adalah Jerman Barat dengan pangsa sebesar 28.8 persen, kemudian diikuti oleh Jepang, Belanda dan Amerika Serikat dengan pangsa masing-masing sebesar 14,9; 13,4 dan 11,8 persen, (Tabel 7).

Tabel 7. Pangsa volume ekspor kopi Indonesia menurut negara tujuan, 1986-1990

Negara tujuan	Volume ekspor (000 ton)	
	1986	1990
1. Jepang	45.5 (15,2)	68.8 (14,9)
2. Singapura	2.7 (0,9)	14.9 (3,2)
3. Amerika Serikat	67.6 (22,6)	54.5 (11,8)
4. Inggris	1 (0,3)	13 (2,8)
5. Belgia & Lux	2.9 (1,0)	5.2 (1,1)
6. Prancis	2.9 (1,0)	5.6 (1,2)
7. Belanda	45.9 (15,3)	61.6 (13,4)
8. Italia	13.4 (4,5)	13.4 (2,9)
9. Denmark	0.3 (0,1)	2.1 (0,5)
10. Jerman Barat	38.7 (12,9)	132.7 (28,8)
11. Maroko	7.2 (2,4)	11.4 (2,5)
12. Aljazair	26.9 (9,0)	0 (0,0)
13. RRC	2 (0,7)	0.5 (0,1)
14. Lainnya	42.4 (14,2)	77.4 (16,8)
Total	299.4 (100)	461.1 (100)

Sumber : BPS (1990)

Keterangan : () persentase terhadap total volume ekspor pada tahun bersangkutan

ANALISIS FINANSIAL DAN EKONOMI

Analisis Finansial

Pertanaman kopi di lokasi penelitian diusahakan PBS, BUMN, dan Rakyat masing-masing sejak tahun 1968, tahun 1979 dan tahun 1952. Komposisi umur tanaman kopi milik petani responden (perkebunan rakyat) didominasi golongan umur 5 - 20 tahun (80%) dan sisanya berumur lebih dari 20 tahun.

Mengingat tanaman kopi adalah tanaman tahunan dan keragaman umurnya beragam, maka analisis dilakukan terhadap kegiatan usahatani dalam periode satu kali panen atau selama satu tahun. Dalam hal ini periode yang dimaksudkan adalah satu tahun kebelakang dari panen terakhir.

Agar hasil analisis terhadap ketiga sistem budidaya kopi (perkebunan rakyat, PBS dan perkebunan milik BUMN) dapat diperbandingkan, maka analisis finansial dibatasi hanya sampai pada tahap budidaya. Biaya penanganan hasil yang dilakukan BUMN dan PBS yang mencakup biaya pengolahan, pengepakan, penyusutan, dan biaya administrasi serta "over head cost", tidak ikut diperhitungkan. Namun demikian produk akhir sebagai patokan penerimaan tetap berupa kopi biji.

Pengusahaan kopi oleh PBS dan BUMN lebih intensif dari pada yang dilakukan perkebunan rakyat sebagaimana dapat diperhatikan dari jumlah penggunaan input yang lebih banyak (Tabel 8). Nilai input (masukan) per hektar ditingkat BUMN dan Swasta masing-masing mencapai Rp 1.007.6 ribu dan Rp 1.014.5 ribu, sedangkan ditingkat Perkebunan Rakyat hanya Rp 582.2 ribu.

Perbedaan jumlah input tersebut berakibat pada perbedaan produktivitas kopi yang dihasilkan. Produktivitas kopi yang dicapai perkebunan rakyat hanya sebesar 673 kg biji kopi per hektar, sedangkan yang dicapai PBS dan BUMN masing-masing sebesar 1065 kg dan 1115 kg biji kopi per hektar.

Disamping produktivitas yang rendah, mutu kopi yang dihasilkan perkebunan rakyat juga tidak sebaik mutu kopi yang dihasilkan PBS dan BUMN. Orientasi pemasaran kopi perkebunan rakyat terutama adalah untuk memenuhi pasar lokal, sedangkan orientasi pemasaran kopi PBS dan BUMN adalah untuk ekspor. Rataan tingkat harga yang diterima petani adalah Rp 1579,- per kg biji kopi, sedangkan yang diterima PBS dan BUMN untuk kualitas sedang adalah Rp 2105,6 per kg biji kopi. Perbedaan harga yang mencolok ini antara lain disebabkan perbedaan mutu.

Dari analisis "cash flow" ditunjukkan bahwa secara finansial biaya pokok per kilogram kopi di tingkat BUMN, PBS dan Perkebunan Rakyat masing-masing adalah Rp 903,7; Rp 938,2 dan Rp 865,1 (Tabel 9). Proporsi terbesar dari biaya usahatani kopi pada ketiga sistem budidaya kopi adalah untuk upah tenaga kerja yang mencapai 47 persen pada perkebunan milik BUMN, 56 persen pada PBS dan 48 persen pada perkebunan rakyat.

Tabel 8. Struktur biaya dan penerimaan usahatani kopi per hektar ditingkat BUMN, PBS dan Perkebunan Rakyat, 1992

Uraian	BUMN			PBS			Rakyat		
	Fisik (kg)	Nilai (Rp)	Pangsa (%)	Fisik (kg)	Nilai (Rp)	Pangsa (%)	Fisik (kg)	Nilai (Rp)	Pangsa (%)
1. Biaya									
Pupuk									
-kimia	866	210500	(20,9)	602	147590	(14,5)	355	82345	(14,1)
-kandang	335	16750	(1,7)	350	17500	(1,7)	85	2975	(0,5)
Pestisida	8,7	92950	(9,2)	5,5	69000	(6,8)	2	3250	(0,6)
TK Luar									
Keluarga	315	472500	(46,9)	377	565500	(55,7)	196	245000	(42,1)
TK Dalam									
Keluarga	-	-	-	-	-	-	27	33750	(5,8)
Sewa lahan	-	214885	(21,5)	-	214885	(21,2)	-	214885	(36,9)
Biaya Total	-	1007585	(100)	-	1014475	(100)	-	582205	(100)
Biaya tunai	-	-	-	-	-	-	-	330595	-
2. Penerimaan									
Produksi									
Biji kopi	1115	2347744		1065	2242464		673	1062667	
3. Keuntungan									
Total		1340159			1227989			480462	
Tunai		-			-			732072	
4. R/C									
R/C tunai		-			-			2,21	
R/C total		1,33			1,21			0,83	

Apabila biaya pokok tersebut dibandingkan dengan harga yang diterima, usahatani kopi pada ketiga sistem budidaya tersebut adalah menguntungkan. Tingkat keuntungan per kilogram di tingkat BUMN, PBS dan perkebunan Rakyat masing-masing mencapai Rp 1201,9; Rp 1167,4 dan Rp 713,9. Sementara itu rasio keuntungan terhadap biaya total di tingkat BUMN, PBS dan perkebunan rakyat masing-masing sebesar 1.33; 1.21 dan 0.83.

Tabel 9. Analisis finansial usahatani kopi di tingkat BUMN, PBS dan Perkebunan Rakyat, 1991

Uraian	BUMN	PBS	Rakyat
	(Rp/Kg)		
1. Biaya			
Pupuk	203.80	155.01	126.78
-kimia	188.80	138.58	122.36
-kandang	15.00	16.43	4.42
Pestisida	83.40	50.42	4.83
TK Luar Klg	423.80	530.99	364.04
TK Dlm Klg	0.00	0.00	50.15
Sewa Lahan	192.70	201.77	319.29
Total Biaya	903.70	938.19	865.09
Biaya Tunai			491.23
2. Penerimaan			
Total	2105.60	2105.60	1579.00
3. Keuntungan			
Total	1201.90	1167.41	713.91
Tunai			1087.77

Analisis Ekonomi

Secara ekonomi biaya pokok per kilogram kopi di tingkat BUMN, PBS dan perkebunan Rakyat masing-masing mencapai Rp 1871,17; Rp 2036,39 dan Rp 1862,78. Biaya pokok ini terdiri dari komponen dalam negeri (domestik) dan komponen asing (impor) dengan proporsi 87,2 dan 12,8 persen di tingkat BUMN, 91 dan 9 persen di tingkat PBS, serta 94,2 dan 5,8 persen di tingkat perkebunan rakyat. Tidak berbeda dengan hasil analisis finansial, proporsi tertinggi dari biaya pokok yang dihasilkan lewat analisis ekonomi adalah untuk biaya tenaga kerja.

Disisi penerimaan, harga ekonomi kopi per kilogram di tingkat BUMN, PBS dan perkebunan rakyat masing-masing adalah Rp 2638,7; Rp 2638,7 dan Rp 1744,4. Harga ekonomi kopi ini di tingkat BUMN, PBS dan perkebunan rakyat masing-masing 25,3; 25,3 dan 10,5% lebih tinggi dibandingkan harga finansialnya.

Keuntungan ekonomi atas biaya total di tingkat BUMN, PBS dan perkebunan rakyat masing-masing sebesar Rp 767,5; Rp 602,3 dan Rp 118,3 per kilogram kopi. Walaupun dari sisi keuntungan ekonomi atas biaya total perkebunan rakyat menderita kerugian sebesar Rp 118,3 per kilogram kopi, tetapi dari sisi keuntungan ekonomi atas biaya tunai perkebunan rakyat mendapatkan keuntungan sebesar Rp 588,4 per kilogram biji kopi. Rasio keuntungan terhadap biaya total di tingkat BUMN, PBS dan perkebunan rakyat masing-masing adalah 0,4; 0,3 dan 0,06. Tabel 10 berikut menyajikan hasil analisis ekonomi.

Tabel 10. Analisis ekonomi usahatani kopi sampai tahap budidaya di tingkat BUMN, PBS dan Perkebunan Rakyat di Jawa Timur, 1992.

	BUMN			PBS			Perkebunan Rakyat		
	Domestik	Impor	Total	Domestik	Impor	Total	Domestik	Impor	Total
	(Rp/Kg)								
1. Biaya									
Pupuk	478.20	159.83	638.03	483.15	121.68	604.83	231.96	103.89	335.85
-kimia	102.64	159.83	262.47	72.35	121.68	194.03	74.08	103.89	177.89
-kandang	375.56	0	375.56	410.80	0	410.80	157.88	0	157.88
Pestisida	4.16	79.21	83.37	3.25	61.55	64.80	0.24	4.59	4.83
TK Luar Keluarga	791.03	0	791.03	991.17	0	991.17	815.45	0	815.45
TK Dalam	0.00	0	0	0.00	0	0.00	112.30	0	112.30
Sewa Lahan	358.74	0	358.74	375.59	0	375.59	594.35	0	594.35
2. Biaya									
Total	1632.13	239.04	1871.17	1853.16	183.23	2036.39	1754.30	108.48	1862.70
Tunai									1156.05
Penerimaan									
Total			2638.67			2638.67			1744.44
3. Keuntungan									
Total			767.50			602.28			-118.34
Tunai									588.39
NBSDN			0.68			0.75			1.07

Koefisien NBSDN di tingkat BUMN, PBS dan perkebunan rakyat masing-masing adalah 0,68; 0,75 dan 1,07. Dari sini ditunjukkan bahwa perusahaan kopi oleh BUMN dan PBS berada pada taraf efisien sehingga mempunyai keunggulan kompetitif dalam perdagangan kopi dunia. Sementara itu Perkebunan Rakyat berada pada taraf tidak efisien sehingga tidak mempunyai daya saing dalam perdagangan kopi dunia.

Perlu dijelaskan bahwa perhitungan di atas hanya sampai pada tahap budidaya dan belum sampai tahap pengolahan hasil. Apabila perhitungan dilakukan sampai tahap pengolahan hasil, maka khusus di tingkat BUMN dan PBS diperoleh nilai koefisien NBSDN sebesar 1,24 dan 1,56 (Tabel 11). Dari sini ditunjukkan bahwa sampai tahap pengolahan, perusahaan kopi di tingkat BUMN dan PBS tersebut ternyata tidak efisien dalam hal penggunaan sumberdaya dalam negeri.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa di sektor pengolahan hasil, yang tentunya memanfaatkan produk industri alat/mesin pengolahan hasil, masih terjadi ketidak-efisienan dalam pemanfaatan sumberdaya dalam negeri, sehingga alat/mesin pengolahan hasil menjadi mahal. Apabila alat/mesin pengolahan hasil

ini dipakai untuk mengolah bahan baku pertanian, maka tentu saja biaya produksi akan menjadi tinggi.

Agar hasil olahan bahan baku pertanian, seperti kopi dapat lebih mampu berkompetisi di pasar dunia, maka dipandang perlu melakukan langkah-langkah deregulasi terhadap industri alat/mesin pengolahan hasil pertanian.

Tabel 11. Analisis ekonomi usahatani kopi sampai tahap pengolahan hasil di tingkat BUMN dan PBS di Jawa Timur, 1992.

Uraian	BUMN			PBS		
	Domestik	Impor	Total	Domestik	Impor	Total
(Rp/Kg)						
1. Biaya						
Budidaya	1632.13	239.04	1871.17	1853.16	183.23	2036.39
Pengolahan	553.26	8.93	562.19	556.8	15.47	572.27
Pengepakan	37.04	34.84	71.88	318.32	37.97	356.29
Penyusutan	272.17	339.5	611.67	918.69	67.12	985.81
Jumlah	2494.60	622.31	3116.91	3646.97	303.79	3950.76
2. Penerimaan			2638.67			2638.67
3. Keuntungan			-478.24			-1312.09
4. NBSDN			1.24			1.56

Elastisitas NBSDN

Elastisitas NBSDN mengukur besarnya perubahan nilai NBSDN yang diakibatkan oleh adanya perubahan parameter tertentu. Definisi elastisitas NBSDN adalah persentase perubahan nilai NBSDN akibat adanya perubahan satu persen dari parameter yang diuji.

Dalam bahasan ini terdapat tiga parameter yang sangat berpengaruh terhadap tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dalam negeri (NBSDN) yaitu harga pupuk, upah tenaga kerja dan harga kopi. Tabel 12 berikut menampilkan elastisitas NBSDN terhadap ketiga parameter tersebut.

Tabel 12. Elastisitas NBSDN terhadap harga kopi, harga pupuk dan upah tenaga kerja pada usahatani kopi BUMN, PBS dan Perkebunan Rakyat.

Sistem Budidaya	Elastisitas NBSDN terhadap		
	Harga kopi	Harga pupuk	Upah tenaga kerja
BUMN	-1,10	0,40	0,47
PBS	-1,07	0,32	0,54
Perkebunan Rakyat	-1,07	0,20	0,53

Dari Tabel 12 ditunjukkan bahwa elastisitas NBSDN terhadap harga kopi lebih besar dari satu dan bertanda negatif. Sementara itu elastisitas NBSDN terhadap harga pupuk maupun upah tenaga kerja lebih kecil dari satu dan bertanda positif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kelayakan usahatani kopi relatif lebih peka terhadap harga kopi itu sendiri dibandingkan terhadap harga pupuk dan upah tenaga kerja.

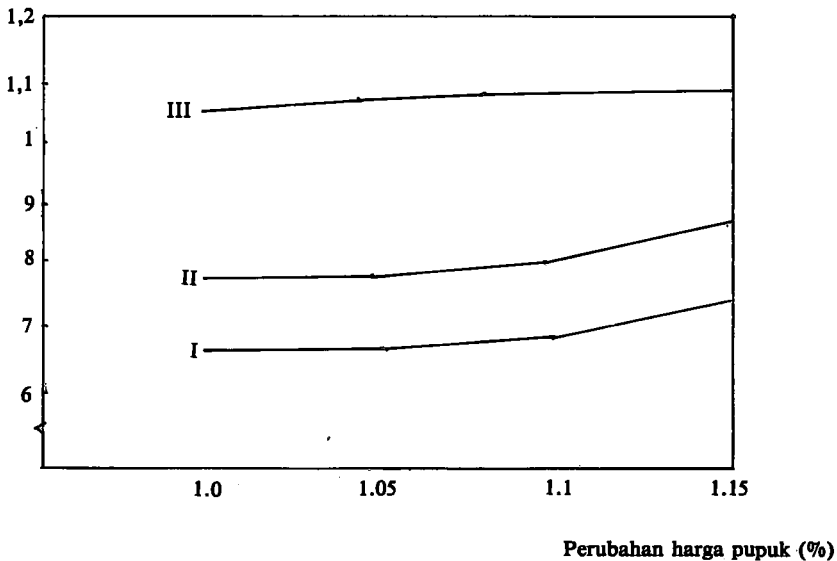
Analisis Kepekaan NBSDN

Analisis kepekaan (sensitivity analysis) NBSDN menelaah besarnya perubahan NBSDN yang akan terjadi seandainya harga masukan berubah dengan persentase tertentu. Dalam hal ini akan ditelaah kepekaan NBSDN terhadap harga pupuk, upah tenaga kerja dan harga kopi.

Untuk menjelaskan kepekaan NBSDN ini dikemukakan skenario berikut:

- (a) harga pupuk berubah sebesar 5, 10 dan 15 persen,
- (b) harga upah tenaga kerja berubah sebesar 5, 10 dan 15 persen, dan
- (c) harga kopi berubah sebesar 5, 10 dan 15 persen.

Koefisien NBSDN



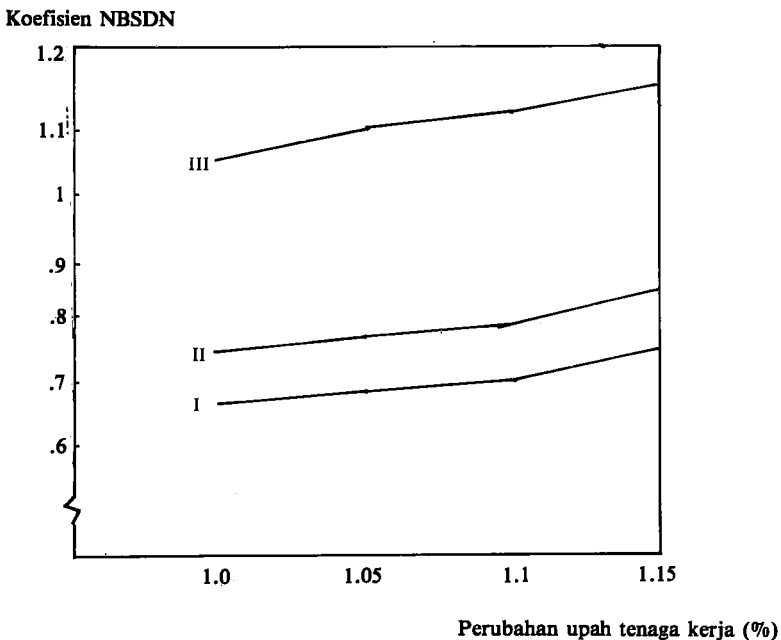
Gambar 1. Grafik hubungan nilai NBSDN dengan perubahan harga pupuk

- I = Usahatani kopi di tingkat BUMN
- II = Usahatani kopi di tingkat PBS
- III = Usahatani kopi di tingkat Perkebunan Rakyat

Dalam skenario tersebut diasumsikan bahwa teknologi yang digunakan tidak berubah, sehingga perubahan NBSDN semata-mata karena skenario tersebut.

Pada skenario pertama, di tingkat BUMN maupun PBS peningkatan harga pupuk sampai 15 persen, menurunkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dalam negeri, tetapi masih menguntungkan. Pola perubahan NBSDN yang disebabkan perubahan harga pupuk di tingkat BUMN dan PBS adalah hampir sama, seperti ditunjukkan oleh kemiringan grafik pada Gambar 1.

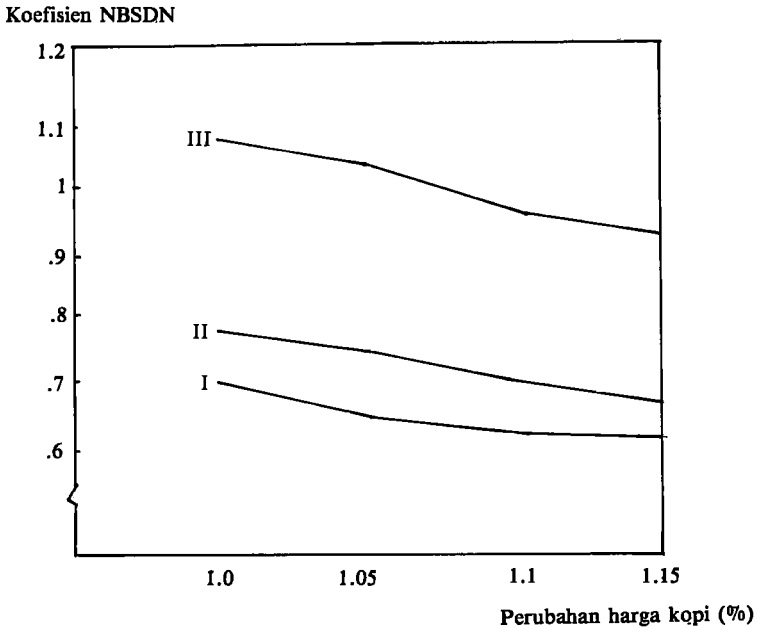
Fenomena diatas terjadi juga untuk perubahan NBSDN yang disebabkan peningkatan upah tenaga kerja (skenario kedua). Di tingkat BUMN dan PBS peningkatan upah tenaga kerja sampai 15 persen juga masih mendatangkan keuntungan meskipun tingkat efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dalam negeri menurun. Begitu juga, pola perubahan NBSDN yang disebabkan perubahan upah tenaga kerja di tingkat BUMN dan PBS adalah hampir sama. Walaupun demikian, peningkatan upah tenaga kerja lebih berpengaruh terhadap perubahan NBSDN dibandingkan peningkatan harga pupuk. Hal ini dapat diperhatikan dari kemiringan grafik I dan II pada Gambar 2 yang lebih curam dibandingkan kemiringan grafik I dan II pada Gambar 1.



Gambar 2. Grafik hubungan nilai NBSDN dengan perubahan upah tenaga kerja

- I = Usahatani kopi di tingkat BUMN
- II = Usahatani kopi di tingkat PBS
- III = Usahatani kopi di tingkat Perkebunan Rakyat

Gambar 3 menampilkan pola perubahan NBSDN di tingkat BUMN dan PBS yang disebabkan perubahan harga kopi (skenario 3). Berbeda dengan kemiringan grafik pada Gambar 1 dan 2, pada gambar 3 kemiringan grafik adalah negatif. Artinya, peningkatan harga kopi sampai 15 persen meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam negeri. Dengan demikian meningkatnya harga kopi dapat memperbesar keuntungan ekonomi usahatani kopi di tingkat BUMN, PBS maupun Perkebunan Rakyat.



Gambar 3. Grafik hubungan nilai NBSDN dengan perubahan harga kopi
 I = Usahatani kopi di tingkat BUMN
 II = Usahatani kopi di tingkat PBS
 III = Usahatani kopi di tingkat Perkebunan Rakyat

Tingkat harga minimal agar diperoleh nilai NBSDN sama dengan satu (=netral) di tingkat BUMN, PBS dan Perkebunan Rakyat masing-masing sebesar Rp 1865, - ; Rp 2045, - dan 1855, - per kilogram. Di tingkat BUMN dan PBS harga minimal ini lebih rendah dibandingkan dengan harga yang berlaku (pada waktu penelitian). Sebaliknya, di tingkat perkebunan rakyat harga minimal tersebut lebih besar dibandingkan harga yang berlaku. Hal ini berarti bahwa BUMN dan PBS masih efisien dalam menghemat sumberdaya dalam negeri.

Rasio harga minimal terhadap harga yang berlaku di tingkat BUMN, PBS dan Perkebunan Rakyat masing-masing adalah 70,7 persen, 77,5 persen dan 106,3 persen. Berdasarkan angka rasio ini, dapat disebutkan bahwa di tingkat BUMN dan PBS efisiensi penggunaan sumberdaya dalam negeri masih dapat terjadi walaupun terdapat penurunan harga kopi sampai 29,3 persen dan 22,5 persen. Sementara itu di tingkat Perkebunan Rakyat efisiensi akan tercapai apabila harga kopi dapat ditingkatkan minimal 6,3 persen dari tingkat harga yang berlaku.

Produktivitas kopi biji yang dibutuhkan guna mencapai harga minimal di tingkat BUMN, PBS dan Perkebunan Rakyat masing-masing sebesar 788 kg/ha; 825,3 kg/ha dan 715,7 kg/hektar. Sementara itu produktivitas kopi biji yang telah dicapai di tingkat BUMN, PBS dan Perkebunan Rakyat masing-masing adalah 1115 kg/ha, 1065 kg/ha dan 673 kg/ha. Dengan demikian karena produktivitas yang dicapai oleh BUMN dan PBS lebih tinggi daripada produktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai harga minimal, maka pada tingkat teknologi yang sama, BUMN dan PBS masih memungkinkan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Sebaliknya, bagi perkebunan rakyat, agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi maka produktivitas yang telah dicapai harus ditingkatkan paling tidak sebesar 6 persen.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Secara finansial perusahaan kopi di tingkat BUMN, PBS maupun Perkebunan Rakyat adalah menguntungkan. Namun, secara ekonomi perusahaan kopi (sampai tahap budidaya) hanya menguntungkan di tingkat BUMN dan PBS.

Pengusahaan kopi sampai tahap budidaya di tingkat BUMN dan PBS adalah efisien dalam pemanfaatan sumberdaya domestik, sehingga mempunyai keunggulan kompetitif dalam perdagangan kopi dunia. Tetapi, perusahaan kopi sampai, tahap pengolahan hasil di tingkat BUMN dan PBS tersebut adalah tidak efisien dan karenanya tidak kompetitif dalam perdagangan kopi dunia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumberdaya domestik di sektor pengolahan hasil pertanian.

Di tingkat BUMN, PBS maupun Perkebunan Rakyat, perubahan harga kopi paling besar pengaruhnya terhadap kelayakan ekonomi usahatani kopi dibandingkan dengan perubahan harga pupuk maupun perubahan upah tenaga kerja.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya dalam negeri pada BUMN dan PBS yang bergerak dalam perusahaan kopi, maka perlu dipertimbangkan langkah-langkah deregulasi terhadap industri alat/mesin pengolahan hasil pertanian. Sementara itu agar perkebunan rakyat mendapatkan keuntungan secara ekonomi maka diperlukan peningkatan teknologi usahatani sehingga produktivitas yang telah dicapai dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- AEKI Jawa Timur. 1991. Perkembangan Realisasi Pengapalan Ekspor Kopi sejak Tahun 1987-1991. Surabaya.
- Baharsjah, S., Yayah K Wagiono dan C.A. Rasahan, 1978. Kopi sebagai Sumber Devisa. Tanggapan Perkopian Indonesia terhadap Perubahan Pasaran Kopi Internasional. Komisi Teknis Perkebunan Budidaya Kopi dan Coklat. Surabaya.
- Bank Dunia. 1992. Primary Commodity Price Forecast. Mimeograph.
- Biro Pusat Statistik, 1990. Statistik Indonesia 1990. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 1989. Statistik Perkebunan Indonesia. Jakarta 1990.
- Yahmadi, M. 1991. Tataniaga dan Pemasaran Kopi. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Jawa Timur. Surabaya.
- Pearson, S.R., N. Akrasane, and G.C. Nelson, 1976. "Comparative Advantage in Rice Production: A Methodology Introduction", Food Research Institute Studies 15 (2): 127-137.
- Suryana, . 1980. Keuntungan Komparatif Usahatani Ubi kayu di daerah Produksi Utama di Lampung dan Jawa Timur. JAE Vol. 1. No. 1. (1 Oktober): 37-55
- Sudaryanto, T dan B. Hutabarat. 1992. Perkembangan harga komoditas Pertanian di Pasar Dunia dan Implikasinya bagi Indonesia. Makalah disampaikan dalam rangka Pembahasan tentang Perspektif Pengembangan Komoditas Pertanian. Bogor 3-4 Juni 1992.
- Sumaryanto dan I Wayan Rusastra. 1991. Analisa Keunggulan Komparatif Industri Pakan Ternak di Jawa Barat dan Lampung. JAE Vol. 10 No. 1 dan No. 2. (Oktober): 56-72.